



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

- Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan:
1. Sekretaris Kementerian BUMN RI,
 2. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI,
 3. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN RI, diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI,
 4. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan
 5. Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero)
- Sifat Rapat : Terbuka
Rapat ke : 24 (dua puluh empat)
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2017
W a k t u : Pukul 14.10 s.d. 17.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat : Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN)
didampingi oleh:
1. Bowo Sidik Pangarso ((Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG);
 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra).
- Sekretaris Rapat : Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a : 1. Membahas terkait tambahan PMN pada APBNP Tahun Anggaran 2017 untuk PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Progress Penerima PMN Tahun Anggaran 2015 khusus untuk PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Mohon diberikan data dan informasi mengenai progress penerima PMN pada BUMN-BUMN pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.
- Hadir : a. 26 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI,
b. Sekretaris Kementerian BUMN RI,
c. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI,
d. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI,
e. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero),
f. Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian BUMN RI, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) dibuka pukul 14.10 WIB dan sifat rapat dinyatakan terbuka.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat pada hari Selasa, 18 Juli 2017 dalam rangka membahas terkait tambahan PMN pada APBNP tahun Anggaran 2017 untuk PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Progress Penerima PMN Tahun Anggaran 2015 khusus untuk PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan mohon diberikan data dan informasi mengenai progress penerima PMN pada BUMN-BUMN pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Sekretaris Kementerian BUMN RI, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi agenda Rapat Dengar Pendapat.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Sekretaris Kementerian BUMN RI, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN RI, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI akan membahas usulan tambahan PMN non tunai sebesar Rp379.318.091.377,75 untuk PT Djakarta Lloyd (Persero) pada APBNP TA 2017 yang merupakan konversi hutang *Sub Loan Agreement* (SLA) dalam rangka memperbaiki struktur modal PT Djakarta Lloyd (Persero) berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-401/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan persetujuan Menteri Keuangan RI melalui surat Nomor S-394/MK.05/2016 dalam Rapat Intern Komisi VI DPR RI sebelum Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI atau Menteri yang mewakili.
2. Komisi VI DPR RI akan menjadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas pendalaman materi mengenai usulan tambahan PMN tunai sebesar Rp2 Triliun dan realokasi PMN Tahun 2015 sebesar Rp2 Triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-401/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan persetujuan Menteri Keuangan RI melalui surat Nomor S-506/MK.06/2017.
3. Komisi VI DPR RI meminta Sekretaris Kementerian BUMN RI menghadirkan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk dalam RDP tersebut untuk meminta penjelasan mengenai realisasi penggunaan dana PMN Tahun 2015 dan progress fisik proyek *Light Rail Transit* (LRT).

4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan, tanggapan dan masukan dalam pembahasan RDP Komisi VI DPR RI tanggal 18 Juli 2017 secara tertulis, serta menyampaikan data kajian PMN Tahun 2017 dan bisnis plan masing-masing persero.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.40 WIB.